

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan suatu halangan yang sangat besar pada perkembangan ekonomi suatu negara karena dapat berujung merugikan negara atau merugikan suatu perusahaan untuk tujuan tertentu. Dalam (UU 31/1999, 1999) disebutkan bahwa “Korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Selain itu, menurut Admusen pada (Shabbir & Anwar, 2007) menyatakan bahwa korupsi sebagai berikut: “Like a cancer, it strikes almost all part of the society and destroy the functional vitals organs”, yang berarti bahwa korupsi sebenarnya menghancurkan semua struktur yang melandasi suatu negara seperti budaya, politik, dan ekonomi. Korupsi pada di Indonesia dalam skala besar diawali pada masa Suharto dan kemudian berkembang hingga sekarang (Hartomo, Agriphina, Tirtasari, Bobby, & Kurnianto, 2018). Salah satu penyumbang perkembangan korupsi di Indonesia merupakan proses desentralisasi pemerintahan dimana tanggung jawab yang lebih diberikan pada tingkat pemerintahan yang lebih kecil (Kuncoro, 2004). Korupsi sendiri dapat dilakukan dengan banyak bentuk diantaranya adalah suap.

Suap tersendiri merupakan bentuk yang paling umum dalam korupsi yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu dengan memberikan biaya yang sepadan kepada pihak lain. Dalam skala perusahaan suap umumnya

dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih atau melewati suatu proses hukum. Tingkat suap suatu negara umumnya dipengaruhi tingkat eksposur terhadap korupsi itu sendiri sehingga tingkat eksposur terhadap risiko setiap negara berbeda (Lee, Oh, & Eden, 2010). Contoh pada negara Indonesia pada tahun 2017 menurut Riset yang dilakukan oleh *Transparency International* tingkat suap menunjukkan bahwa 32% masyarakat melakukan tindakan suap kepada badan publik untuk mendapatkan kemudahan akses. Dalam kenyataannya suatu suap dari sebuah perusahaan paling sedikit memakan 8% dari beban perusahaan tersebut dan memakan paling tidak 10% waktu dari sebuah penataan manajemen di suatu perusahaan yang memiliki tujuan untuk “meperhalus” suatu proses bisnis dengan pihak pemerintah terutama pada bagian pajak dan administrasi (Henderson, 2006). Hal ini merupakan suatu dasar untuk menyusun laporan anti-korupsi pada sebuah perusahaan

Sistem anti-korupsi merupakan sistem untuk mencegah dan menanggulangi tindak korupsi. Dalam tingkat perusahaan sistem tersebut digunakan untuk mencegah terjadinya tindakan suap atau tindakan korupsi yang akan dilihat pada tingkat pengungkapan sistem tersebut. Tingkat pengungkapan ini berhubungan bagaimana suatu perusahaan menata strategi, kebijakan, dan memonitor bagaimana suatu sistem yang ditetapkan sehingga menunjukkan suatu komitmen dalam partisipasinya untuk melawan tindakan korupsi (Transparency International, 2009). Fenomena yang ditemui pada studi-studi sebelumnya bahwa lingkungan bisnis mempunyai pengaruh pada tingkat pengungkapan dari sistem anti korupsi yang ada. Diantaranya adalah profitabilitas. Hal yang ditemui adalah

pada perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan mengenai anti korupsi yang tinggi pada negara yang memiliki tingkat risiko yang tinggi cenderung memiliki tingkat pertumbuhan dan profitabilitas yang kecil dibanding memiliki tingkat pengungkapan yang rendah. Sistem anti-korupsi ini akan dilihat dengan cara seberapa tinggi pengungkapan yang diberikan dari perusahaan kepada masyarakat dan publik.

Dalam menentukan apakah sistem anti-korupsi yang ada memiliki sifat komitmen maka diperlukan juga audit yang memadai terhadap suatu sistem anti-korupsi tersebut. Umumnya untuk mendapatkan audit hingga kebijakan-kebijakan yang spesifik diperlukan audit yang berkompentensi. Untuk mendapatkan audit yang memadai tersebut maka diperlukan suatu KAP yang memiliki kompetensi (berkualitas tinggi). DeAngelo dalam (Yaşar, 2013) mengemukakan bahwa suatu kualitas audit sangat dipengaruhi oleh ukuran KAP yang memberikan audit tersebut.

Selain audit juga ada ukuran suatu perusahaan tersebut juga mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap korupsi. Tindakan korupsi dapat berbeda dengan ukuran perusahaan dimana ukuran perusahaan menjadi sebuah tolak ukur kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki untuk melakukan korupsi tersebut (Sullivan, Wilson, & Nadgrodkiewicz, 2013). Diharapkan dengan kemampuan yang lebih perusahaan lebih memiliki sistem anti-korupsi yang lebih rumit serta lebih menunjukkan komitmen dan tidak melakukan korupsi. juga memiliki hubungan dengan suatu profitabilitas dan perkembangan dari sebuah entitas tersebut (Becker-blease, Kaen, & Baumann, 2010). Ukuran perusahaan

menjadi sebuah contoh bahwa dengan berkembangnya perusahaan yang kecil menjadi besar dibutuhkan juga suatu kebijakan yang lebih rumit menata bisnisnya.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat pengungkapan ini adalah risiko industri dari sebuah perusahaan. Risiko industri merupakan situasi dimana suatu perusahaan tersebut menjalankan bisnis mereka. Risiko ini dilihat berdasarkan seberapa tinggi kemungkinan terjadi suap. Umumnya industri yang memiliki Risiko bertingkat tinggi adalah perusahaan yang memiliki regulasi atau pengawasan yang ketat dari pemerintah (Pertambangan, Kehutanan, Pertahanan, Telekomunikasi, Migas, dan Pembangunan) (Transparency International, 2009). Selain risiko industri juga ada *Leverage*. *Leverage* sendiri memiliki pengertian sebagai seberapa besar tingkat asset yang dibiayai dengan hutang (Sudarmadji & Sularto, 2007). *Leverage* sendiri merupakan indikasi yang baik bagaimana sebenarnya perusahaan mendapat pendanaan untuk menjalankan bisnis mereka. Umumnya perusahaan dengan tingkat *Leverage* yang tinggi memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi.

Penelitian yang dilakukan sebelum-sebelumnya mengambil sampel dari *Forbes 250* yang merupakan perusahaan terbesar di dunia. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bersifat multi-nasional dan besar sehingga memiliki sumber daya yang cukup untuk memasang suatu sistem manajemen yang baik yang salah satunya merupakan sistem-anti suap. Selain itu, dengan adanya pengambilan suatu perusahaan yang bersifat multi national terdapat perbedaan dorongan dari negara-negara yang ada pada perusahaan tersebut.

Perbedaan dorongan ini dapat menjadi suatu pembeda bagi perusahaan untuk mengungkapkan suatu pengungkapan anti-korupsi yang ada.

Bedasarkan pertanyaan diatas dan faktor-faktor diatas maka penulis mengajukan judul sebagai berikut: **“Pengaruh Risiko Industri, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Dan Ukuran KAP Pada Kemungkinan Pengungkapan Anti-Korupsi Perusahaan”**

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian yang diberikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah:

1. Apakah semakin tinggi risiko industri maka semakin tinggi kemungkinan pengungkapan anti-korupsi perusahaan?
2. Apakah semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan pengungkapan anti-korupsi perusahaan?
3. Apakah semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemungkinan pengungkapan anti-korupsi perusahaan?
4. Apakah semakin tinggi *Leverage* maka semakin tinggi kemungkinan pengungkapan anti-korupsi perusahaan?
5. Apakah semakin tinggi ukuran KAP semakin tinggi kemungkinan pengungkapan anti-korupsi perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh risiko industri terhadap kemungkinan pengungkapan anti-korupsi perusahaan
2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap kemungkinan pengungkapan anti-korupsi perusahaan
3. Untuk menguji pengaruh profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan anti-korupsi perusahaan
4. Untuk menguji pengaruh *Leverage* terhadap kemungkinan pengungkapan anti-korupsi perusahaan
5. Untuk menguji pengaruh ukuran KAP terhadap kemungkinan pengungkapan anti-korupsi perusahaan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian dimasa yang akan datang serta dapat menjadi sebuah dasar untuk menyusun suatu sistem anti-korupsi

2. Manfaat Praktik

Memberikan suatu gambaran mengenai suatu sistem anti-korupsi sehingga sistem yang lebih efektif dapat ditetapkan pada di masa datang sehingga korupsi semakin dapat diberantas dan dikurangi.

3. Manfaat Kebijakan

Diharapkan dengan penelitian ini pengetahuan mengenai korupsi terutama suap menjadi lebih luas sehingga pemerintah dapat menyusun suatu kebijakan bagi perusahaan yang ada untuk memiliki sistem anti-korupsi yang memadai sehingga korupsi terutama suap dapat diberantas.

1.5 Kerangka Pikir

Dalam memerangi korupsi untuk meningkatkan suatu kesejahteraan, perkembangan, dan ekonomi negara tidak hanya dapat dilakukan secara skala besar saja yaitu negara. Kenyataannya kemungkinan untuk terjadi korupsi paling tinggi merupakan pada skala mikro atau perusahaan dengan suap. Hal ini tentu

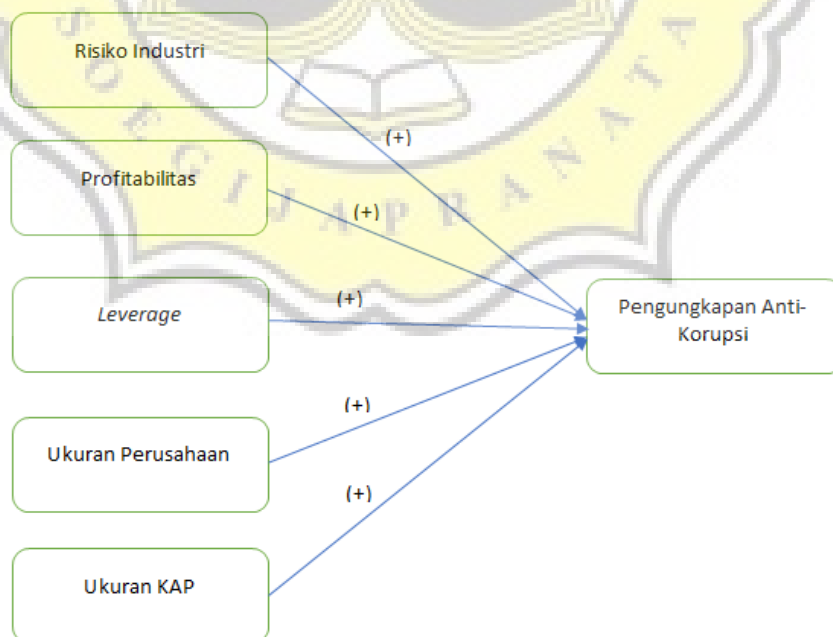
menjadi indikasi bahwa untuk memerangi korupsi dengan baik seharusnya dilakukan dengan cara memberantas dalam skala kecil tersebut. Tentu ini menjadi sebuah motivasi bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen dalam memerangi korupsi dengan cara mengungkapkan sistem anti-korupsi yang ada. Namun suatu sistem anti-korupsi yang diungkapkan mempunyai nilai yang berbeda-beda sehingga untuk menilai apakah sistem anti-korupsi ini handal dan menunjukkan komitmen maka sistem yang ada tersebut akan dinilai dengan menggunakan suatu *Index*.

Penelitian ini ingin melihat apakah dalam mengungkapkan sistem anti-korupsi yang ada dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah risiko industri yang merupakan tingkat eksposur suatu perusahaan dalam bidang industrinya dimana suatu perusahaan yang berjalan dalam bidang utilitas publik atau berhubungan langsung dengan pemerintah (Pertambangan, Kehutanan, Pertahanan, Telekomunikasi, Migas, dan Pembangunan) merupakan industri yang memiliki risiko paling tinggi untuk melakukan korupsi (Transparency International, 2009). Risiko tersebut dapat menjadi suatu tekanan yang mendorong suatu perusahaan untuk melakukan tindakan korupsi (Sullivan et al., 2013).

Faktor lain yang berpengaruh adalah profitabilitas atau tingkat laba. Umumnya peningkatan dalam laba menunjukkan suatu efektivitas suatu perusahaan. Dalam hal ini dapat dilihat dalam (Sullivan et al., 2013) dimana perusahaan yang bertatakelola baik dan mempunyai transparansi dalam melawan korupsi umumnya mempunyai nama baik sehingga mempunyai penjualan yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak. Selain itu juga ada *leverage* yang menjadi suatu risiko

berkelanjutan bisnis suatu perusahaan. Dengan adanya tingkat *leverage* yang tinggi perusahaan diharapkan melaporkan suatu informasi yang lebih bagaimana mereka mengelolah dana yang ada disuatu perusahaan dan apakah dana tersebut dapat dipertanggung jawabkan asalnya (Ahmed, 1999).

Selain itu juga ada Ukuran perusahaan tersebut dan Ukuran KAP yang digunakan untuk mengaudit. Ukuran perusahaan sendiri didasarkan pada jumlah sumber daya perusahaan yang ada. Dengan adanya sumber yang lebih maka diperlukan juga suatu kebijakan atau sistem yang lebih kompleks untuk mengelola dan menjalankan bisnis tersebut. Hal ini sangat berkaitan dengan ukuran KAP yang digunakan dengan lebih kompleks nya suatu kebijakan maka diperlukan juga kualitas audit yang dibutuhkan untuk menilai suatu laporan tersebut agar laporan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.



Gambar 1.1 Kerangka Pikir